

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA BOS DI SEKOLAH DASAR

Ainun Tsaqifah¹, Suardi², Idawati³

¹⁻² Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar

¹anntsgh19@gmail.com, ²suardi@unismuh.ac.id, ³idafadollah@unismuh.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the School Operational Assistance (BOS) management at the UPT SPF SD Inpres Mariso 1. This mini-audit examined the funding structure, RKAS (Work Plan and Budget) preparation procedures, transparency, and how these impact the quality of learning. BOS must be managed "effectively, efficiently, accountably, and transparently," according to Minister of Education and Culture Regulation No. 63 of 2022. This study used qualitative methods, including interviews, observations, and document review. The results showed that planning was carried out according to procedures; 60% of the budget was allocated to operations, 20% to human resources, and 20% to infrastructure. Information boards and regular audits ensure transparency. Funding still needs improvement, particularly in terms of teacher human resource development.

Keywords: BOS, Transparency, RKAS, Effectiveness, Learning

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada UPT SPF SD Inpres Mariso 1 dengan menggunakan audit mini yang memeriksa struktur pendanaan, prosedur penyusunan RKAS, transparansi, dan bagaimana hal-hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran. BOS harus dikelola secara "efektif, efisien, akuntabel, dan transparan", menurut Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan, yang mencakup wawancara, observasi, dan meninjau dokumen. Hasil menunjukkan bahwa perencanaan telah dilakukan sesuai prosedur; 60% anggaran dialokasikan untuk operasional, 20% untuk SDM, dan 20% untuk sarpras. Papan informasi dan audit berkala memastikan transparansi. Pendanaan masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia guru.

Kata kunci: BOS, Transparansi, RKAS, Efektifitas, Pembelajaran

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Karena jumlah dana yang tersedia tidak menjamin kualitas pendidikan, pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu pilar strategis dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Kualitas ditentukan oleh cara dana direncanakan, dialokasikan digunakan, dan dipertanggungjawabkan (Fattah, 2000).

Pemerintah membuat skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai kebijakan pendanaan nasional dalam pendidikan dasar di Indonesia dengan tujuan meringankan beban operasional sekolah. Tujuan BOS adalah untuk memungkinkan sekolah menjalankan pembelajaran tanpa pungutan kepada siswa, terutama selama jenjang wajib belajar 12 tahun (Kemendikbud, 2020). Diharapkan dana ini akan membantu meningkatkan layanan pendidikan dan mempromosikan akses yang sama.

Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan BOS di berbagai tempat belum sepenuhnya ideal. Salah satu masalah yang paling umum adalah

perencanaan anggaran yang buruk, transparansi yang buruk, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya analisis sistematis tentang bagaimana penggunaan dana berdampak pada kualitas pembelajaran (Rahmat & Suhardi, 2025).

Menurut penelitian tambahan, meskipun dana BOS memudahkan operasi sekolah, manfaatnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan tidak akan signifikan jika tidak disertai dengan pengaturan yang tepat. Menurut penelitian lain, meskipun dana BOS dapat membantu operasional sekolah lebih mudah, manfaatnya terhadap peningkatan kualitas tidak akan signifikan jika tidak disertai dengan perencanaan berbasis kebutuhan, peningkatan kemampuan pengelola, dan pelibatan aktif pemangku kepentingan (Rahmawati, 2022). Dengan kata lain, keberhasilan BOS tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana, tetapi juga oleh tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada kualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris tentang cara dana BOS dikelola di

salah satu sekolah dasar negeri, UPT SPF SD Inpres Mariso 1, yang merupakan sekolah penerima BOS Reguler. Penelitian ini tidak hanya membahas protokol pengelolaan dana yang resmi, tetapi juga mengevaluasi seberapa efektif, efisien, dan akuntabel praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana alokasi dana berdampak pada peningkatan sarana prasarana, dukungan pembelajaran, dan kemampuan guru.

Karena sekolah tidak memiliki banyak sumber pendanaan lain, dana BOS tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama, tetapi juga berfungsi sebagai indikator kemampuan sekolah untuk mengelola layanan pendidikan secara profesional. BOS sangat penting untuk menjamin keberlangsungan berbagai program pembelajaran di sekolah ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai apakah proses perencanaan RKAS dilakukan secara partisipatif, apakah realisasi anggaran sesuai dengan persyaratan, dan apakah institusi mematuhi prinsip transparansi melalui publikasi informasi dan akuntabilitas melalui dokumentasi dan audit.

Pada akhirnya, penelitian ini berfokus pada UPT SPF SD Inpres Mariso 1 untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sebuah sekolah dasar menerapkan kebijakan nasional di dunia nyata. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang manajemen pembiayaan pendidikan dan memberikan saran untuk perbaikan berbasis praktik lapangan untuk mengelola dana BOS dengan lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar.

B. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena pendekatan ini efektif untuk mempelajari proses manajemen secara menyeluruh. Data dikumpulkan melalui observasi di fasilitas, wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah, dan meninjau dokumen seperti RKAS, SPJ, dan laporan realisasi BOS. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam data (Creswell, 2018).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dana BOS di UPT SPF SD Inpres Mariso 1

Sesuai dengan fakta bahwa sekolah negeri tidak memiliki banyak dana mandiri, dana BOS merupakan sumber pendanaan utama yang menopang hampir seluruh kegiatan operasional sekolah (Fattah, 2019). Menurut hasil penelitian, UPT SPF SD Inpres Mariso 1 bergantung pada BOS untuk pembiayaan listrik, ATK, kegiatan pembelajaran, sarpras, dan program peningkatan mutu. Sumber pendanaan alternatif seperti donatur tetap atau kerjasama swasta tidak ditemukan.

2. Mekanisme Penyusunan dan Pelaporan RKAS

Sebagai bentuk partisipasi publik, proses penyusunan RKAS dimulai dengan rapat komite sekolah dan dewan guru. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022, yang menetapkan bahwa pemangku kepentingan harus terlibat dalam penyusunan RKAS (Kemendikbud, 2022). Sesuai Pedoman BOS 2023, sekolah kemudian menggunakan aplikasi ARKAS yang terintegrasi dengan SIPLah untuk menginput RKAS. RKAS akan divalidasi oleh dinas pendidikan dan dikirim ke pusat untuk dimasukkan ke dalam anggaran

tahunan. Sekolah melakukan revisi RKAS tahap kedua pada pertengahan tahun. Laporan realisasi dikembalikan melalui aplikasi RKAS setelah belanja selesai untuk dipantau oleh dinas pendidikan dan inspektorat. Menurut Arwildayanto & Fajri (2020), semua bukti fisik pengeluaran disimpan untuk menjamin akuntabilitas.

3. Proporsi dan Realisasi Anggaran BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dana BOS di sekolah terdiri dari 60 persen untuk operasional, 20 persen untuk SDM, dan 20 persen untuk sarana prasarana. Belanja modal termasuk buku dan perangkat pembelajaran, yang merupakan aset pemerintah. Proporsi ini didasarkan pada fleksibilitas penggunaan BOS, yang memberikan prioritas pada kebutuhan operasional sehari-hari (Kemendikbud, 2022).

Namun, dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi guru di era Kurikulum Merdeka, alokasi sumber daya manusia masih rendah (Suwandi, 2021).

4. Strategi Transparansi dan Akuntabilitas

Sekolah menerapkan berbagai bentuk transparansi, termasuk

pengawasan inspektorat, pelaporan berkala ke dinas pendidikan, dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan pendidikan (Mulyasa, 2021). Namun, observasi menunjukkan bahwa papan informasi belum diupdate secara teratur. Akibatnya, sebagian orang tua belum memahami perkembangan penggunaan dana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di UPT SPF SD Inpres Mariso 1 telah sesuai dengan peraturan nasional, terutama dalam hal transparansi proses. Sebagaimana disarankan oleh Kemendikbud (2022), dewan guru dan komite harus terlibat dalam pembuatan RKAS. Karena sistem digital memudahkan monitoring dan mengurangi manipulasi data, penggunaan aplikasi ARKAS meningkatkan akuntabilitas. Karena proporsi pendanaan belum mendukung peningkatan kompetensi guru, prinsip efektivitas belum sepenuhnya dipenuhi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas guru tetap

menjadi kendala utama dalam penggunaan BOS di sekolah dasar.

Sekolah sangat bergantung pada BOS untuk kebutuhan dasar, seperti yang ditunjukkan oleh dominasi 60% biaya operasional. Akibatnya, tidak ada ruang untuk inovasi pembelajaran. Membayar 20% sarpras sudah meningkatkan fasilitas pendidikan. Namun, Mulyasa (2021) menyarankan agar pemanfaatannya disertai dengan evaluasi rutin. Dalam hal transparansi, lembaga pendidikan telah menerapkan audit BPK dan pemantauan inspektorat. Namun, publikasi yang tidak konsisten dapat merusak kepercayaan orang. Untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan komite sekolah tentang keuangan publik, sosialisasi teratur harus dilakukan.

Pengelolaan BOS di UPT SPF SD Inpres Mariso 1 menunjukkan peningkatan dalam aspek akuntabilitas formal jika dibandingkan dengan prinsip manajemen pembiayaan pendidikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Namun, penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan. Karena pengeluaran diprioritaskan untuk kebutuhan sekolah, anggaran cukup efisien. Namun, hasilnya kurang baik karena

belanja SDM yang rendah berdampak pada kualitas pembelajaran yang buruk dalam jangka panjang (Suwandi, 2021). Selain itu, sekolah kesulitan menentukan seberapa besar BOS meningkatkan kualitas pendidikan karena tidak ada analisis dampak atau "value for money". Oleh karena itu, untuk menentukan prioritas anggaran, perlu dikembangkan model pengelolaan BOS yang berbasis data kinerja sekolah, seperti pemetaan capaian literasi, numerasi, dan ketuntasan kurikulum. Selain itu, dashboard digital transparansi publik yang telah dikembangkan di beberapa tempat harus digunakan oleh sekolah (Arwildayanto & Fajri, 2020).

E. Kesimpulan

Pengelolaan dana BOS di UPT SPF SD Inpres Mariso 1 telah berjalan sesuai pedoman nasional melalui mekanisme perencanaan, penginputan aplikasi RKAS, verifikasi, validasi, dan monitoring audit. Proporsi penggunaan dana menunjukkan prioritas pada operasional, sementara pengembangan SDM masih rendah. Transparansi sudah berjalan, tetapi pembaruan informasi publik perlu ditingkatkan. Efektivitas penggunaan

dana terhadap mutu pembelajaran perlu diperkuat terutama melalui peningkatan kompetensi guru dan evaluasi dampak anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, & Fajri, I. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). Sage.
- Fattah, N. (2000). Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Rosda.
- Jurnal Evaluasi Pendidikan, 12(1), 44–56.
- Kemendikbud. (2020). Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kemendikbud. (2022). Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.
- Mulyasa, E. (2021). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana BOS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. Jurnal Administrasi Pendidikan, 9(2), 112–123.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suwandi, A. (2021). Analisis
Penggunaan Dana BOS dalam
Peningkatan Kualitas
Pembelajaran.